

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2019, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikategorikan baik. Terdapat beberapa poin dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam kategori instruktif sebesar 12,34% kecuali Kota Palembang dan Kabupaten Belitung yang termasuk kategori konsultatif. Dengan demikian dapat dinyatakan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung masih belum optimal melaksanakan otonomi daerah.
2. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari rasio efektivitas PAD termasuk kategori cukup efektif yaitu sebesar 94,27%.
3. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari rasio efisiensi belanja dikategorikan sudah efisien yaitu sebesar 89,44%. Rasio efisiensi belanja masih kurang dari 100% dari nilai anggaran belanjanya sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah efisien dalam menggunakan anggaran belanjanya.
4. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari rasio keserasian menunjukkan belanja operasi sebesar 72,82% dengan belanja modal sebesar 26,51% telah proporsional.

5. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari rasio pertumbuhan PAD rata-rata menunjukkan peningkatan positif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebaiknya meningkatkan PAD masing-masing dengan cara mengelola pemungutan PAD yaitu dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber yang berpotensi meningkatkan PAD serta memaksimalkan peran organisasi-organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pendapatan sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi daerah, sebaiknya pemerintah memberikan informasi secara rinci kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebaiknya lebih proporsional dalam mengalokasikan belanja dengan mengurangi alokasi belanja operasi dan meningkatkan alokasi belanja modal sehubungan dengan penyediaan sarana prasarana untuk layanan publik.
3. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebaiknya dapat mengoptimalkan pertumbuhan PAD dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya, memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD dan melakukan pengawasan serta pengendalian secara intensif dan berkelanjutan untuk menghindari penyalahgunaan dalam pemerolehan PAD sehingga kinerja pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi lebih baik.

4. Efisiensi belanja pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditingkatkan dengan mengatur pembelanjaan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan melakukan pengawasan untuk menghindari pemborosan dan penyimpangan.
5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menganalisis lebih dalam kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan belanja sehingga dapat lebih baik lagi dalam menggambarkan kondisi keuangan daerah. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode waktu penelitian dan memperluas wilayah penelitian dengan menambah kabupaten/kota pada provinsi yang lainnya.